



**EVALUASI  
PENANGANAN RUU DALAM PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2020  
TANGGAL 12 MEI 2020**

**I. RUU DALAM TAHAP PEMBAHASAN (PEMBICARAAN TINGKAT I)**

<b>N O.</b>	<b>JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>PENYIAPAN RUU DAN NA</b>	<b>KET.</b>
1.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	PEMERINTAH	<b>Merupakan RUU Carry Over</b> RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di <b>Komisi III</b> MP. IV 2014-2015 sesuai Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 24 Juni 2015.
2.	RUU tentang Bea Materai.	PEMERINTAH	<b>Merupakan RUU Carry Over</b> Surpres Tgl 16 Juli 2018 No. R-34/Pres/07/2018 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 6 September 2018 MP I 2018-2019 dibahas oleh <b>Komisi XI</b>
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.	PEMERINTAH	<b>Merupakan RUU Carry Over</b> Surpres Tgl 12 November 2018 No. R-53/Pres/11/2018 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 29 November 2018 MP II 2018-2019 dibahas oleh <b>Komisi III</b>
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi	PEMERINTAH	Surpres Tgl 24 Januari 2020 No. R-05/Pres/01/2020 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 3 Februari 2020 MP II 2019-2020 dibahas oleh <b>Komisi I</b>
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian ( <i>Omnibus Law</i> )	PEMERINTAH	Surpres Tgl ... Februari 2020 Nomor ..... Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus MP III 2019-2020 dibahas oleh <b>Komisi XI</b>
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Dalam Prolegnas RUU Prioritas 2020 adalah Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja ) ( <i>Omnibus Law</i> )	PEMERINTAH	Surpres Tgl 7 Februari 2020 Nomor R-06/Pres/02/2020 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl ...April MP III 2019-2020 dibahas oleh <b>Badan Legislasi</b>

**II. RUU AKAN MEMASUKI TAHAP PEMBAHASAN TINGKAT I**

<b>NO.</b>	<b>JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>PENYIAPAN RUU DAN NA</b>	<b>KET.</b>
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR/Anggota	Surat Pengusul (2 orang Anggota dari Fraksi Gerindra) No.2127/II/2020, Tgl 5 Februari 2020, permintaan utk di harmonisasi Selesai Harmonisasi Tgl 19 Februari

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
			2020 Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 2 April 2020 <b>Menunggu Surpres</b>
2.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	DPR/Anggota/ Kumulatif Terbuka	<b>RUU Kumulatif Terbuka Usul Anggota</b> Surat Pengusul (a.n. Supratman Andi Agtas/FP-Gerindra), Nomor 128/II/2020, Tgl 3 Februari 2020 Selesai Harmonisasi Tgl 19 Februari 2020 Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 2 April 2020 <b>Menunggu Surpres</b>
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR/Komisi VIII	Selesai Harmonisasi Tgl 8 Mei 2020 Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 12 Mei 2020 <b>Menunggu Surpres</b>
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila	DPR/Badan Legislasi	Selesai Penyusunan di Badan Legislasi Tgl 22 April 2020 Disetujui menjadi RUU Usul DPR pada Paripurna Tgl 12 Mei 2020 <b>Menunggu Surpres</b>
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR/Anggota	Surat Pengusul (23 Anggota dari FP Nasdem) No. F.NasDem.035/DPR-RI/I/2020 tgl 31 Januari 2020 permintaan utk di harmonisasi Selesai Harmonisasi Tgl 11 Mei 2020 <b>Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR</b>

### III. RUU DALAM TAHAP HARMONISASI

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Psikologi	DPR/Anggota	Surat Pengusul (Desy Ratnasari/FPAN) No. 0028/DR.PAN/I/2020 tgl 27 Januari 2020 permintaan utk di harmonisasi <b>Dlm Proses Harmonisasi</b>
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/Anggota	Surat Pengusul (12 Anggota FP Nasdem)

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
			No. F.NasDem.054/DPR-RI/II/2020 tgl 6 Februari 2020 permintaan utk di harmonisasi <b>Dlm Proses Harmonisasi</b>
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga	DPR/Anggota	Surat Pengusul (5 org Anggota lintas Fraksi) tgl 7 Februari 2020 permintaan utk di harmonisasi <b>Dlm Proses Harmonisasi</b>

#### IV. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPR RI

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR/Komisi I	
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR/Komisi I	
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan	DPR/Komisi II	
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR/Komisi II	
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR/Komisi IV	
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR/Komisi IV	
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR/Komisi V	
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR/Komisi V	
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19	DPR/Komisi	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
	Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	VI	
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR/Komisi VI	
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR/Komisi VII	
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR/Komisi VIII	
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR/Komisi IX	
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR/Komisi IX	
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	DPR/Komisi X	
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	DPR/Komisi X	
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR/Komisi XI	
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan	DPR/Badan Legislasi	
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR/Badan Legislasi	
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR/Badan Legislasi	<b><i>Dlm Tahap RDP/RDPU</i></b>
21.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional	DPR/Anggota	
22.	Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian ( <i>Omnibus Law</i> )	DPR/Anggota	
23.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial	DPR/Anggota	
24.	Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional	DPR/Anggota	

<b>NO.</b>	<b>JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>PENYIAPAN RUU DAN NA</b>	<b>KET.</b>
25.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR/Anggota	
26.	Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR/Anggota	
27.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji)	DPR/Anggota	
28.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional	DPR/Anggota	

#### **V. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI PEMERINTAH**

<b>NO.</b>	<b>JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>PENYIAPAN RUU DAN NA</b>	<b>KET.</b>
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	PEMERINTAH	
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	PEMERINTAH	
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	PEMERINTAH	
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara ( <i>Omnibus law</i> )	PEMERINTAH	
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	PEMERINTAH	
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut	PEMERINTAH	
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	PEMERINTAH	

## VI. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPD RI

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan	DPD	

## VII. RUU YANG SUDAH DISETUJUI MENJADI UU

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia – Australia ( <i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> )	PEMERINTAH	<b>RUU Kumulatif Terbuka.</b> Disetujui Menjadi UU dlm Rapur Tgl 6 Februari 2020
2.	RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang	PEMERINTAH	<b>RUU Kumulatif Terbuka.</b> Disetujui Menjadi UU dlm Rapur Tgl 12 Mei 2020
3.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	DPR / KOMISI VII	<b>Merupakan RUU Carry Over.</b> Disetujui Menjadi UU dlm Rapur Tgl 12 Mei 2020